



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program
Sarjana

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Pemanfaatan *Politicized Collective Identity* dalam
Gerakan Sosial #MeToo di Korea Selatan Tahun 2018-
2020

Skripsi

Oleh

Fiona Margaretha

6092001067

Bandung

2024



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program
Sarjana

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Pemanfaatan *Politicized Collective Identity* dalam
Gerakan Sosial #MeToo di Korea Selatan Tahun 2018-
2020

Skripsi

Oleh

Fiona Margaretha

6092001067

Pembimbing

Anggia Valerisha, S.IP., M.Si.

Bandung

2024

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Fiona Margaretha
Nomor Pokok : 6092001067
Judul : Pemanfaatan *Politicized Collective Identity* dalam Gerakan Sosial #MeToo di Korea Selatan Tahun 2018-2020

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 11 Desember 2023
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D.

:

Sekretaris

Anggia Valerisha, S.IP., M.Si.

:

Anggota

Yulia Indrawati Sari, Ph.D.

:

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Orpha Jane, S.Sos., M.M.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Fiona Margaretha

NPM : 6092001067

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Pemanfaatan *Politicized Collective Identity* dalam Perkembangan Gerakan Sosial #MeToo di Korea Selatan Tahun 2018-2020

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip penulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 2 November 2023



Fiona Margaretha

ABSTRAK

Nama : Fiona Margaretha

NPM : 6092001067

Judul : Pemanfaatan *Politicized Collective Identity* dalam Gerakan Sosial #MeToo di Korea Selatan Tahun 2018-2020

Gerakan #MeToo dimulai di negara Amerika Serikat dan berhasil berkembang menjadi suatu gerakan sosial global dengan bantuan globalisasi, media sosial, dan jurnalisme. Sebagai gerakan sosial yang cenderung merepresentasikan pengalaman kehidupan sebagai perempuan, gerakan ini berhasil menarik perhatian masyarakat dunia, tak terlepas negara Korea Selatan. Korea merupakan negara dengan budaya patriarki yang masih kuat, dan ini menjadi salah satu penyebab adanya penolakan terhadap gerakan feminis seperti #MeToo di negara tersebut. Masalah dalam penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa terlepas dari adanya penolakan yang cukup keras dari masyarakat terhadap para feminis, #MeToo dapat berkembang pesat di Korea Selatan dan membawa banyak perubahan positif mulai dari kehidupan penyintas hingga perubahan institusional dalam negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pemanfaatan *politicized collective identity* dalam gerakan #MeToo di Korea Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan: “Bagaimana *politicized collective identity* dimanfaatkan dalam gerakan sosial #MeToo di Korea Selatan tahun 2018-2020?”. Tulisan ini menganalisis kasus tersebut dengan menggunakan teori-teori gerakan sosial dan teori *politicized collective identity* dalam psikologi politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus serta menggunakan data-data sekunder seperti dokumen resmi pemerintah, laporan, artikel pada media massa, dan sumber-sumber internet yang valid. Dalam penelitian ini ditemukan setidaknya 4 (empat) jenis identitas-identitas kolektif yang dipolitisasi, yaitu 1) identitas sebagai penyintas, 2) identitas sebagai pekerja, 3) identitas sebagai perempuan, dan 4) identitas sebagai feminis. Keempat *politicized collective identity* tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai motivasi partisipan gerakan #MeToo untuk tetap beraksi dan sebagai salah satu aspek untuk menangkal aksi kelompok anti-feminis.

Kata kunci: gerakan sosial, #MeToo, identitas kolektif, feminis, patriarki, Korea Selatan

ABSTRACT

Name : Fiona Margaretha
Student Number : 6092001067
Title : The Utilization of Politicized Collective Identity in South Korea's #MeToo Movement on 2018-2020

The #MeToo movement began in the United States of America and has managed to grow globally with the help of globalization, social media, and journalism. As a social movement which mostly represents women's experience, #MeToo became relatable and successfully piqued the interest of global citizens including South Korea. As a country with strong patriarchal influence, feminist actions like #MeToo tends to be opposed by their citizens. The problem in this research came from the assumption that despite the strong opposition towards feminists, #MeToo still managed to grow successfully in South Korea and has brought varying social changes starting from the lives of the sexual harassment survivor to institutional changes within the country. The purpose of this research is to explore the utilization of politicized collective identity in South Korea's #MeToo movement. Therefore, this research tried to answer to this question: "How was the politicized collective identity utilized in South Korea's #MeToo movement on 2018-2020?". This research used social movement theory and politicized collective identity theory in political psychology. The study case in qualitative method and secondary data such as official government documents, reports, mass media articles, and valid sources from the internet was used in this research. In this research, it was found that at least 4 politicized collective identities were utilized. These 4 are: 1) identity as a survivor, 2) identity as a worker, 3) identity as a woman, and 4) identity as a feminist. These 4 politicized collective identities were utilized as a motivation to drive the #MeToo participants to keep fighting and as an aspect to counter the act of the anti-feminist and #MeToo community.

Keyword: social movement, #MeToo, collective identity, feminist, patriarchy, South Korea

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingannya terhadap penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian berjudul “Pemanfaatan *Politicized Collective Identity* dalam Gerakan Sosial #MeToo di Korea Selatan Tahun 2018-2020” untuk memperoleh gelar sarjana dari program studi Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian ini menjadi penting agar pembaca dapat memahami besarnya peran masyarakat sipil Korea Selatan dalam membawa perubahan melalui gerakan sosial #MeToo di tahun 2018-2020. Tulisan ini berfokus pada teori psikologi politik dalam gerakan sosial dan *politicized collective identity*. Eksplorasi penelitian dibatasi pada aspek sosial budaya karena hanya meneliti fenomena ketidaksetaraan gender, feminis, dan identitas kolektif dalam gerakan #MeToo.

Penulis sadar bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, penulis berharap agar penelitian ini tetap dapat memberikan informasi serta perspektif baru terkait penggunaan *politicized collective identity* dalam gerakan #MeToo terhadap pembaca. Demi perbaikan penelitian untuk kedepannya, penulis akan menerima kritik, saran, dan rekomendasi dari pembaca secara terbuka.

Bandung, 9 Oktober 2023



Fiona Margaretha

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian proses penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan secara langsung maupun tidak langsung dari pihak-pihak terdekat saya. Maka, dalam kesempatan kali ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas bantuan dan kekuatan yang diberikan kepada penulis secara spiritual.
2. Keluarga inti terdekat yang terdiri dari ayah, ibu, dan kakak atas dukungan, hiburan, dan kepercayaan yang diberikan selama ini.
3. Mbak Anggia Valerisha, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membantu mengarahkan saya dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi.
4. Teman-teman SMA yang telah selalu mendukung dan mendoakan saya, dari jauh diantaranya Gloria, Kim, Teje, Wina, Flowrin, Vella, Cecil, Inge, dan Megan.
5. Untuk teman-teman di UNPAR yang telah menemani penulis selama berkuliah dan tinggal di Bandung, diantaranya Thania, Meira, Gabby, Dea, Angel, Dhiga, Tania, dan Caca.
6. Seluruh pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan semua namanya dalam tulisan ini.

Semoga seluruh bantuan dan kehangatan yang mereka berikan kepada saya selama ini dapat mereka terima kembali dalam hidup mereka.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.2.1 Deskripsi Masalah	7
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	8
1.2.3 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian	10
1.4 Kajian Literatur	11
1.5 Kerangka Pemikiran	16
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	24
1.6.1 Metode Penelitian	24
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	25
1.7 Sistematika Pembahasan	26
BAB II : KESETARAAN GENDER, IDENTITAS KOLEKTIF, DAN GERAKAN #METOO DI KOREA SELATAN	28
2.1 Konfusianisme dan Patriarki di Korea Selatan	28
2.1.1 Konfusianisme di Korea Selatan	28
2.1.2 Patriarki di Korea Selatan.....	30
2.1.3 Ketidaksetaraan Gender di Korea Selatan	31
2.1.4 Hubungan antara Ketidaksetaraan Gender dengan Kekerasan Seksual	36
2.1.5 Sikap Anti-Feminis di Korea Selatan	39
2.2 Profil Warga Korea Selatan Tahun 2018-2020	42
2.2.2 Preferensi Politik Warga Korea Selatan	42
2.2.3 Sebaran Usia Penduduk Korea Selatan.....	44
2.2.5 Kondisi Perekonomian Mayoritas Warga Korea Selatan	46
2.3 Gerakan Sosial #MeToo di Korea Selatan	48
2.3.1 Perkembangan #MeToo dari Amerika Serikat hingga mencapai Korea Selatan.....	48
2.3.2 Contoh Kasus Kekerasan Seksual #MeToo di Korea Selatan	53
2.3.2.1 Kasus Kekerasan Seksual Seo Ji Hyun	53
2.3.2.2 Kasus Kekerasan Seksual Kim Ji Eun	56
2.3.2.3 Kasus Kekerasan Seksual Shim Suk Hee	57
2.3.2.4 Kasus Kekerasan Seksual oleh Park Won Soon	58

2.3.2.5 Kasus Kekerasan Seksual oleh Oh Keo Don	59
2.3.3 Identifikasi Identitas Kolektif dalam Gerakan #MeToo di Korea Selatan	60
BAB III : ANALISIS GERAKAN #METOO DI KOREA SELATAN.....	64
3.1 Gerakan #MeToo di Korea Selatan sebagai Gerakan Sosial.....	64
3.1.1 <i>Dynamics of Demand</i> dalam Gerakan #MeToo di Korea Selatan	64
3.1.2 <i>Dynamics of Supply</i> Gerakan #MeToo di Korea Selatan	66
3.1.3 Karakteristik Gerakan #MeToo di Korea Selatan	68
3.2 Analisis Komponen Emosional dalam Psikologi Politik Gerakan #MeToo di Korea Selatan	72
3.2.1 Komponen Emosional Gerakan #MeToo di Korea Selatan	72
3.3 Analisis <i>Politicized Collective Identity</i> dalam Gerakan #MeToo di Korea Selatan	75
3.3.1 <i>Politicized Collective Identity</i> Kesatu & Kedua: Identitas sebagai Penyintas dan Pekerja.....	75
3.3.1.1 <i>Awareness of Shared Grievances</i>	75
3.3.1.1.1 <i>Awareness of Shared Grievances</i> sebagai Penyintas	75
3.3.1.1.2 <i>Awareness of Shared Grievances</i> sebagai Pekerja.....	78
3.3.1.2 <i>Adversarial Attribution to Blame Opponents</i>	80
3.3.1.3 <i>The Involvement of Society</i>	82
3.3.2 <i>Politicized Collective Identity</i> Ketiga: Identitas sebagai Perempuan	84
3.3.2.1 <i>Awareness of Shared Grievances</i>	84
3.3.2.2 <i>Adversarial Attribution to Blame Opponents</i>	87
3.3.2.3 <i>The Involvement of Society</i>	89
3.3.3 <i>Politicized Collective Identity</i> Keempat: Identitas sebagai Feminis.....	91
3.3.3.1 <i>Awareness of Shared Grievances</i>	91
3.3.3.2 <i>Adversarial Attribution to Blame Opponents</i>	93
3.3.3.3 <i>The Involvement of Society</i>	95
3.4 Hambatan perkembangan gerakan #MeToo di Korea Selatan.....	98
3.4.1 <i>Awareness of Shared Grievances</i> Kelompok Anti-Feminis	98
3.4.2 <i>Adversarial Attribution to Blame Opponents</i> oleh Kelompok Anti-Feminis	100
3.4.2 <i>The Involvement of Society</i> yang Dilakukan Kelompok Anti-Feminis	101
3.5 Pemanfaatan <i>Politicized Collective Identity</i> dalam Gerakan #MeToo di Korea Selatan	102
BAB IV.....	107
KESIMPULAN DAN SARAN	107
Daftar Pustaka.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Identifikasi In-group dan Out-group dari 5 Contoh Kekerasan Seksual #MeToo di Korea Selatan	80
Tabel 3.2 Perbandingan Politicized Collective Identity dari Kelompok Pendukung dan Penentang #MeToo di Korea Selatan.....	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Teori Politicized Collective Identity	22
Gambar 1.2 Bagan Model Kerangka Pemikiran Terkait Gerakan Sosial dalam Psikologi Politik	23
Gambar 2.1 Grafik GII Korea Selatan Tahun 2018	32
Gambar 2.2 Grafik GII Korea Selatan Berdasarkan Indikator WEF	33
Gambar 2.3 Grafik Kesenjangan Upah di Korea Selatan dari Tahun 2000-2019 Berdasarkan Laporan OECD.....	34
Gambar 2.4 Grafik Penduduk dengan Usia produktif Korea Selatan	45
Gambar 3.1 Analisis #MeToo di Korea Selatan dengan Teori Gerakan Sosial dan Psikologi Politik	75
Gambar 3.2 Bagan Analisis Politicized Collective Identity Kelompok Pendukung #MeToo	98
Gambar 3.3 Bagan Analisis Politicized Collective Identity Kelompok Anti-Feminis	102

DAFTAR SINGKATAN

AS	Amerika Serikat
BBC	<i>British Broadcasting Corporation</i>
CEO	<i>Chief Executive Officer</i>
CNN	<i>Cable News Network</i>
DPK	<i>Democratic Party of Korea</i>
DUHAM	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
GII	<i>Gender Inequality Index</i>
JTBC	<i>Joongang Tongyang Broadcasting Company</i>
MOGEF	<i>Ministry of Gender Equality and Family</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
UNDP	<i>United Nations Development Programme</i>
WEF	<i>World Economic Forum</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan internasional kontemporer tidak lagi hanya menyangkut peran aktor negara namun juga aktor non-negara seperti aktivis dan masyarakat sipil. Salah satu peran masyarakat sipil yang krusial saat ini dalam membawa perubahan sosial ke arah yang lebih baik adalah dengan menginisiasikan suatu gerakan sosial. Di abad ke-21 ini gerakan sosial menjadi salah satu fenomena yang tidak bisa dipisahkan dengan hubungan internasional karena banyak sekali gerakan sosial yang bersifat transnasional. Kemudahan suatu gerakan sosial untuk berkembang melampaui batas negara didukung oleh perkembangan teknologi dan globalisasi.

Menurut Klandermans dan Van Stekelenburg, gerakan sosial adalah tantangan kolektif oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama dan solidaritas yang diarahkan pada golongan elit dan pihak berwenang dalam interaksi berkelanjutan.¹ Tantangan kolektif ini bertujuan untuk menantang struktur atau *status quo* yang terjadi sehingga pada akhirnya, gerakan sosial seringkali menjadi tonggak perubahan dalam masyarakat ke arah yang lebih baik. Gerakan sosial terbagi menjadi *old social movement* dan *new social movement*, gerakan sosial yang terjadi setelah Perang Dunia II dapat dikategorikan sebagai *new social movement*

¹ Martha L. Cottam, Elena Mastors, Thomas Preston, dan Beth Dietz-Uhler, *Introduction to Political Psychology: Third Edition*, (New York: Routledge, 2016), 328.

sedangkan gerakan sosial yang terjadi sebelum Perang Dunia II dikategorikan sebagai *old social movement*.² Perang Dunia II menjadi fenomena penting dalam perkembangan gerakan sosial.

Perbedaan mendasar antara *old* dan *new social movement* adalah tipe gerakan sosialnya dimana *old social movement* bersifat lebih ketat dan formal sedangkan *new social movement* bersifat *loose* dan informal.³ Salah satu bentuk *new social movement* yang paling sering digunakan akhir-akhir ini adalah penggunaan tagar atau *hashtag* di sosial media khususnya Twitter. Menurut Yang, aktivisme yang memanfaatkan penggunaan *hashtag* dalam unggahan-unggahan di sosial media untuk menuntut, mengajukan, atau menyuarakan suatu klaim sosial-politik disebut juga dengan *hashtag activism*.⁴

Salah satu contoh dari *hashtag activism* adalah gerakan sosial #MeToo. #MeToo pertama kali dibuat oleh aktivis perempuan Amerika Serikat bernama Tarana Burke pada tahun 2006. Tagar ini bertujuan untuk meningkatkan keberanian penyintas kekerasan seksual dalam menceritakan pengalamannya dan menyuarakan urgensi penghilangan segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual di dunia.⁵ Tagar ini mulai mendunia di tahun 2017 ketika aktris Alyssa Milano menulis sebuah cuitan di twitter yang berbunyi “*If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet.*” atau dalam Bahasa Indonesianya,

² Ibid, 331.

³ Ibid.

⁴ Jing Guo dan Shujun Liu, “From #BlackLivesMatter to #StopAsianHate: Examining Network Agenda-Setting Effects of Hashtag Activism on Twitter,” *Social Media + Society* Vol. 8, no. 4, (2022): 1-12, <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/20563051221146182>.

⁵ “MeToo: History & Inception,” MeToo Movement, diakses pada 8 Maret 2022, <https://metoomvmt.org/get-to-know-us/history-inception/>.

“Jika Anda pernah mengalami pelecehan atau kekerasan seksual, tuliskan *me too* sebagai respon atas cuitan ini.” Cuitan Milano kemudian memperoleh ribuan respon dan menginspirasi banyak figur publik lainnya seperti Lady Gaga, Viola Davis, Evan Rachel Wood untuk menggunakan #MeToo dalam menceritakan pengalamannya sebagai penyintas kekerasan seksual.⁶ Berangkat dari fenomena inilah #MeToo akhirnya bisa mengglobal hingga ke Korea Selatan.

Di Korea Selatan, tagar ini mulai populer ketika jaksa umum Seo Ji Hyun menyuarkan pengalaman pelecehan seksualnya yang dilakukan oleh salah satu eks-staf Kementerian Keadilan Korea Selatan di salah satu acara televisi nasional JTBC.⁷ Tindakan yang dilakukan Seo Ji Hyun ini menimbulkan efek domino karena telah berhasil menginspirasi banyak penyintas kekerasan seksual di Korea Selatan untuk ikut bersuara dengan menggunakan #MeToo di sosial media.⁸ Fenomena tersebut dapat dibuktikan dengan bagaimana #MeToo termasuk dalam *top 10* isu yang paling sering dibahas di *Twitter* Korea Selatan di tahun 2018.⁹ Gerakan #MeToo ini telah membawa banyak perubahan di Korea selatan. Terdapat setidaknya 3 (tiga) dampak positif dari gerakan #MeToo. 1) meningkatkan kesehatan mental penyintas kekerasan seksual di Korea Selatan¹⁰, 2) memunculkan

⁶ Mary Pflum, “A Year Ago, Alyssa Milano Started a Conversation about #MeToo. These Women Replied,” NBC News, 16 Oktober 2018, <https://www.nbcnews.com/news/us-news/year-ago-alyssa-milano-started-conversation-about-metoo-these-women-n920246>,

⁷ Laura Bicker, “#MeToo Movement Takes Hold in South Korea,” BBC, 26 Maret 2018, <https://www.bbc.com/news/world-asia-43534074>.

⁸ Laura Bicker, *Ibid*.

⁹ Yim Hyun Su, “#MeToo, Feminism Dominated Twitter in 2018,” The Korea Herald, 6 Desember 2018, <https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20181206000775>.

¹⁰ Kim Chungah, Andrew Nielsen, Celine Teo, dan Antony Chum, “Social Movement and Mental Health of South Korean Women Sexual Violence Survivors, 2012–2019,” *American Journal of Public Health* Volume 112, no. 9, (2022): 1337 - 1345, <https://www.proquest.com/docview/2709982601/D64AFBAB39CD4A17PQ/52?accountid=31495>

lingkungan yang suportif terhadap penyintas¹¹, dan 3) munculnya perhatian dari petinggi-petinggi negara Korea Selatan seperti mantan Presiden Moon-Jae In akan urgensi pentingnya perubahan struktural untuk mencegah tindakan kekerasan seksual atau meningkatkan upaya perlindungan penyintas.¹² Dari perubahan-perubahan tersebut dapat disimpulkan bahwa gerakan #MeToo di Korea Selatan telah berjalan ke arah yang positif.

Selain karena ada seorang figur publik yang menyuarkan pengalamannya sebagai penyintas, masifnya gerakan #MeToo di Korea Selatan terjadi karena setidaknya 5 (lima) faktor. 1) ketidaksetaraan gender, 2) stereotip gender, 3) budaya patriarki, 4) nilai-nilai konfusianisme, dan 5) sikap anti-feminis. Berdasarkan laporan dari *The World Economic Forum* tahun 2022, Korea Selatan menempati peringkat ke 99 dari 146 negara untuk kategori kesetaraan gender.¹³ Selain itu, berdasarkan *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), kesenjangan upah di Korea Selatan selalu jauh lebih tinggi dari rata-rata negara OECD lainnya.¹⁴

Selain ketidaksetaraan gender, stereotip gender, budaya patriarki, dan nilai-nilai konfusianisme juga telah mempersulit kehidupan perempuan Korea Selatan.

¹¹ Ki Young Shin, "Beyond #WithYou: The New Generation of Feminists and the #MeToo Movement in South Korea," *Journal of Politics and Gender* Vol. 17, no. 3, (2021): 507-513, <https://www.cambridge.org/core/journals/politics-and-gender/article/beyond-withyou-the-new-generation-of-feminists-and-the-metoo-movement-in-south-korea/779DB02C1385B1251E7D62C75457EB29>.

¹² "South Korea's President Urges MeToo Investigations," Al Jazeera, 26 Februari 2018, <https://www.aljazeera.com/news/2018/2/26/south-koreas-president-urges-metoo-investigations>.

¹³ Haeryun Kang, "Despite Stark Gender Inequality in South Korea, Hostility to Feminism is Growing," NBC, 4 Desember 2022, <https://www.nbcnews.com/news/world/stark-gender-inequality-south-korea-hostility-feminism-growing-rcna59747>.

¹⁴ Gender Equality: Korea Has Come a Long Way, but There is More Work To Do," OECD, 25 Oktober 2021, <https://www.oecd.org/country/korea/thematic-focus/gender-equality-korea-has-come-a-long-way-but-there-is-more-work-to-do-8bb81613/>.

Konfusianisme merupakan salah satu ideologi yang dipraktikkan secara luas oleh masyarakat Korea Selatan, terutama dalam area keluarga dan pendidikan.¹⁵ Menurut kelompok feminis Korea Selatan, ideologi konfusianisme menekankan pentingnya subordinasi perempuan terhadap laki-laki yang membuat kebebasan perempuan lebih dibatasi.¹⁶ Pandangan ideologi konfusianisme ini menjadi salah satu alasan mengapa budaya patriarki dapat dipertahankan dan sangat mendominasi masyarakat Korea Selatan.

Tuntutan-tuntutan dan tekanan yang diarahkan kepada perempuan membuat aksi-aksi para feminis lebih diperhatikan di Korea Selatan dan aspek kesetaraan gender akhirnya mulai didukung oleh pemerintah Korea Selatan sejak tahun 2000.¹⁷ Meskipun banyak terjadi perubahan ke arah yang positif bagi kehidupan perempuan di Korea Selatan semenjak masuknya ideologi feminisme, ideologi ini juga menuai banyak kontroversi dari sekelompok masyarakat yang menyebut dirinya ‘anti-feminis’ dan sebagai pejuang hak laki-laki. Gerakan ini muncul sebagai bentuk protes terhadap kelompok feminis yang dianggap sebagai gerakan untuk membenci laki-laki. Kelompok pejuang hak laki-laki ini juga memprotes tindakan pemerintah Korea Selatan yang mendukung feminis, mereka merasa terancam dengan keberadaan perempuan dan menilai perempuan sebagai rival dalam dunia

¹⁵ Anthony Kuhn, “A Woman Takes A Lead Role in Confucian Ceremonies, Breaking a New Path in South Korea,” NPR, 19 Oktober 2021, <https://www.npr.org/2021/10/19/1045999366/women-equality-south-korea-confucian-ceremony-confucianism>.

¹⁶ Eunkang Koh, “Gender Issues and Confucian Scriptures: Is Confucianism Incompatible with Gender Equality in South Korea?,” *Bulletin of SOAS* Vol, 71 no. 2, (2008): 345-362, doi:10.1017/S0041977X08000578.

¹⁷ Yeongyo Shin dan Selee Lee, “Escape the Corset: How a Movement in South Korea Became a Fashion Statement Through Social Media,” *Sustainability* 2022, no. 14, (2022): 1-22, <https://doi.org/10.3390/su141811609>.

pekerjaan. Berdasarkan survei dari media lokal SisaIn, 60% laki-laki dalam rentang usia 20-an menunjukkan keengganan dalam menerima ideologi feminisme.¹⁸

Sebagai gerakan yang sangat feminis dan seringkali merepresentasikan perempuan, gerakan #MeToo juga menerima banyak penolakan dari laki-laki di Korea Selatan. Dari survei yang diadakan oleh Institusi Pembangunan Perempuan Korea Selatan di tahun 2018, dari 1000 laki-laki dalam usia 20-an, 55% diantaranya menolak gerakan #MeToo dan hanya 18% responden yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang gerakan feminisme.¹⁹ Penolakan ini disebabkan oleh pandangan bahwa gerakan #MeToo membuat laki-laki menjadi tidak diadili secara adil ketika dituduh menjadi pelaku kekerasan seksual.²⁰ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa gerakan #MeToo dilihat sebagai gerakan untuk mendiskriminasi laki-laki.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka tulisan ini kemudian mencoba meneliti lebih dalam mengenai fenomena gerakan sosial #MeToo yang bisa berkembang dan membawa dampak besar di Korea Selatan karena adanya *politicized collective identity*. Penelitian ini menjadi penting karena untuk melihat bagaimana peran identitas kolektif dalam membawa perubahan di suatu negara.

¹⁸ Haeryun Kang, Ibid.

¹⁹ Jake Kwon, "South Korea's Young Men are Fighting Against Feminism," CNN, 23 September 2019, <https://edition.cnn.com/2019/09/21/asia/korea-angry-young-men-intl-hnk/index.html>.

²⁰ Jake Kwon, Ibid.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Dari penjelasan di bagian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa feminis sering diasosiasikan dengan suatu hal yang negatif di Korea Selatan. Hal ini dikarenakan segala kebijakan pemerintah dan aksi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dianggap telah merugikan laki-laki Korea Selatan.²¹ Selain itu, aksi para feminis di Korea Selatan juga sering disamakan dengan gerakan radikal untuk membenci laki-laki.²² Banyak aktivis feminis di Korea Selatan yang menjadi korban *doxing* (bocornya informasi pribadi), menerima ancaman pembunuhan, dan di-*label* sebagai pembuat masalah.²³ Fenomena ini membuat banyak feminis di Korea Selatan yang harus melaksanakan aksinya secara diam-diam.²⁴ Kebencian terhadap feminis telah menyulitkan aktivis kesetaraan gender untuk menyampaikan pesan-pesan mereka.

Tetapi gerakan #MeToo justru menunjukkan hal sebaliknya. #MeToo merupakan gerakan sosial yang identik dengan feminis dan sering kali dicap negatif oleh laki-laki Korea Selatan. Hal ini dikarenakan gerakan #MeToo dianggap telah mengurangi kesempatan akan pengadilan yang adil

²¹ Spencer Hines dan Jay Song, "How Feminism Became a Dirty Word in South Korea, The Diplomat, 30 Juli 2021, <https://thediplomat.com/2021/07/how-feminism-became-a-dirty-word-in-south-korea/>.

²² Ashley Ahn, "Feminists are Protesting Against The Wave of Anti-Feminism That's Swept South Korea, NPR, 3 Desember 2022, <https://www.npr.org/2022/12/03/1135162927/women-feminism-south-korea-sexism-protest-haeil-yoon>.

²³ Jean Mackenzie, "As South Korea Abolishes Its Gender Ministry, Women Fight Back," BBC, 14 Desember 2022, <https://www.bbc.com/news/world-asia-63905490>.

²⁴ Haeryun Kang, Ibid.

bagi pria yang dituduh sebagai pelaku kekerasan sosial oleh kelompok pejuang hak laki-laki di Korea Selatan. Tetapi, terlepas dari respon negatif dari segelintir orang di Korea Selatan terhadap gerakan #MeToo, gerakan ini tetap bisa berkembang pesat.

Maka, masalah dalam penelitian ini adalah penolakan keras sekelompok masyarakat Korea Selatan dan kuatnya patriarki terhadap gerakan #MeToo seharusnya membuat perkembangan gerakan ini terhambat dalam masyarakat. Tetapi gerakan ini justru tetap mendapat dukungan banyak warga Korea Selatan, bahkan telah membawa beberapa perubahan sosial ke arah yang lebih positif, dan tetap berkembang. Oleh karena itu, terdapat suatu anomali yaitu gerakan #MeToo yang sangat feminis tetap bisa berkembang dengan masif dan membawa perubahan sosial di Korea Selatan di tengah penolakan mayoritas laki-laki Korea Selatan terhadap maupun aksi feminis. Asumsi dari penelitian ini adalah gerakan #MeToo tetap bisa berkembang secara masif di Korea Selatan karena adanya pemanfaatan *politicized collective identity*.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada gerakan sosial #MeToo di negara Korea Selatan dalam rentang tahun 2018-2020. Negara Korea Selatan dipilih karena menjadi salah satu negara di Asia dengan gerakan #MeToo paling masif. Kemudian tahun 2018-2020 dipilih karena rentang waktu tersebut merupakan waktu puncak pergerakan #MeToo di Korea Selatan dimana

terjadi banyak perubahan dan karena gerakan #MeToo baru masuk Korea Selatan di tahun 2018.

Penelitian berfokus pada identitas kolektif dalam kelompok pendukung gerakan #MeToo di Korea Selatan sebagai salah satu faktor pendorong utama masifnya gerakan ini. Studi kasus untuk melihat *politicized collective identity* dibatasi pada 8 *event* tertentu yaitu: kekerasan seksual Seo Ji Hyun, Kim Ji Eun, Shim Suk Hee, Oh Keo Don, dan Park Won Soon, gerakan #mylifeisnotyourporn, gerakan #WithYou, dan demonstrasi Hyehwa. Kasus-kasus tersebut dipilih karena mencirikan kasus politik luar biasa yang dipublikasikan secara masif karena melibatkan aktor-aktor *influential* di Korea Selatan seperti mantan calon presiden Korea Selatan, mantan Walikota Seoul, dst. Lalu 3 gerakan lainnya merupakan gerakan sosial yang berhubungan dengan #MeToo di Korea Selatan.

Aspek yang diteliti hanya aspek sosial-budaya dari gerakan #MeToo di Korea Selatan karena tulisan berfokus pada fenomena ketidaksetaraan gender, feminis, dan identitas kolektif dalam gerakan #MeToo. Analisis dilakukan dalam 2 level; pertama menganalisis mengapa kasus-kasus yang dipilih termasuk dalam *politicized collective identity*, dan kedua menganalisis bagaimana *politicized collective identity* tersebut dimanfaatkan dalam gerakan #MeToo di Korea Selatan. Terakhir, penelitian ini hanya melihat gerakan sosial ini dari sudut pandang psikologi politik dan tidak bermaksud untuk membedah pesan-pesan atau konten pada artikel media. Artikel pada media hanya dilihat sebagai sumber informasi semata.

1.2.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan: “Bagaimana *politicized collective identity* dimanfaatkan dalam gerakan sosial #MeToo di Korea Selatan tahun 2018-2020?”.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam pemanfaatan *politicized collective identity* dalam gerakan #MeToo di Korea Selatan. Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk memenuhi syarat kelulusan program sarjana Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penemuan baru dan analisis akan besarnya peran latar belakang identitas kolektif dapat menjadi basis bagi masyarakat, individu, maupun pemerintah untuk menginisiasikan suatu gerakan sosial yang baru agar bisa sukses gerakan #MeToo. Sehingga, ke depannya, diharapkan bahwa inisiasi dan implementasi gerakan sosial yang baru bisa lebih efisien dan efektif karena inisiator telah mempelajari strategi kesuksesan gerakan #MeToo melalui pemanfaatan *politicized collective identity*. Selain itu penelitian dapat berguna menjadi sumber referensi untuk penelitian serupa

dan penelitian dapat berguna dalam memberikan perspektif baru terkait *politicized collective identity*.

1.4 Kajian Literatur

Terdapat lima artikel ilmiah dari jurnal yang digunakan untuk memetakan topik penelitian ini. Artikel jurnal pertama berjudul “*#MeToo and US Politics: Analyzing the Twitter Conversation*” oleh Vittoria Bernardini. Tulisan ini menyatakan gerakan sosial #MeToo di Amerika Serikat (AS) dapat berkembang karena banyak lapisan masyarakat AS yang menentang Presiden Donald Trump. Gerakan ini seringkali dipolitisasi oleh politikus AS yang menyebabkan polarisasi antar kelompok pendukung dan penentang gerakan #MeToo. Politisasi ini membuat gerakan #MeToo yang seharusnya bertujuan untuk melawan segala bentuk kekerasan seksual menjadi sesuatu yang dimanfaatkan para politikus AS untuk menuai dukungan dari masyarakat AS dan menjatuhkan lawan politik. Misalnya saja, kelompok demokrat di AS menggunakan #MeToo untuk memobilisasi masyarakat dalam menentang Presiden Trump dari kelompok *republican*. Singkatnya, menurut Bernardini, #MeToo dapat berkembang di AS karena terjadi politisasi gerakan sosial untuk melawan rival politik.²⁵ Tulisan Bernardini telah berkontribusi dalam memberikan inspirasi bahwa preferensi politik dapat dipolitisasi dalam suatu gerakan sosial.

²⁵ Vittoria Bernardini, “#MeToo and US Politics: Analyzing the Twitter Conversation,” *Journal of Liberty and International Affairs* Vol. 7, no. 3, (2021): 33-49, <https://www.proquest.com/docview/2754881966/9D1D76EEA8774C0DPQ/3?accountid=31495>.

Artikel jurnal kedua berjudul “*Sharing #MeToo on Twitter: Incidents, Coping Responses, and Social Reactions*” ditulis oleh Kimberly T. Schneider dan Nathan J. Carpenter. Tulisan ini menyatakan gerakan #MeToo bisa berkembang karena banyaknya penyintas kekerasan seksual yang membutuhkan *coping mechanism*. Lewat gerakan #MeToo, penyintas bisa menyuarkan pengalamannya, merespon pengalaman penyintas lainnya, dan mendapat informasi tentang bagaimana cara untuk mencari bantuan atau menyembuhkan trauma yang dimiliki penyintas. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya peran sosial media sebagai wadah bagi penyintas untuk menerima dukungan dari lingkungan sosial.²⁶ Tulisan Schneider dan Carpenter berkontribusi dalam memberikan informasi terkait dampak positif gerakan #MeToo secara umum.

Kemudian, dalam artikel jurnal ketiga oleh Kim Chungah, Andrew Nielsen, Celine Teo, dan Antony Chum yang berjudul “*Social Movement and Mental Health of South Korean Women Sexual Violence Survivors, 2012–2019*” dinyatakan bahwa gerakan #MeToo telah membantu memperbaiki kesehatan mental penyintas kekerasan seksual di Korea Selatan. Selain itu dinyatakan, bahwa meskipun #MeToo berawal dari gerakan di sosial media, gerakan ini telah memengaruhi aspek kehidupan sosial masyarakat dengan memberantas tindakan kebencian

²⁶ Kimberly T. Schneider dan Nathan J. Carpenter, “Sharing #MeToo on Twitter: Incidents, Coping Responses, and Social Reactions,” *Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal* Vol. 39, no. 1, (2020): 87-100, <https://www.proquest.com/docview/2534480162/fulltextPDF/9D1D76EEA8774C0DPQ/10?accountid=31495>.

terhadap perempuan, membantu memperbaharui proses pelaporan tindakan kekerasan seksual, dan memicu perubahan politik serta legislatif.²⁷ Tulisan Kim Chungah, et. al berkontribusi dalam memberikan informasi terkait dampak positif gerakan #MeToo secara spesifik di Korea Selatan.

Artikel jurnal keempat yang berjudul “*From Madwomen to Whistleblowers: #MeToo in South Korea as an Institutional Critique*” oleh Ha Yeon Choo, dinyatakan bahwa gerakan #MeToo awalnya hanya bertujuan untuk mendorong penyintas kekerasan seksual untuk bersuara. Namun, sekarang gerakan ini tidak hanya berada dalam ranah gender tetapi juga mulai menyebar ke ranah ketidakadilan sosial di tempat bekerja. Korban-korban penyalahgunaan kekuasaan di dunia kerja kerap menggunakan tagar ini untuk menceritakan pengalaman mereka. Perkembangan ini menyebabkan gerakan #MeToo menjadi simbol untuk melawan ketidakadilan karena hirarki sosial di Korea Selatan. Singkatnya, menurut Choo, #MeToo bisa berkembang di Korea Selatan karena adanya pengalaman kolektif dari kelompok masyarakat yang merasa ditindas oleh pihak berkuasa sehingga mereka pun bersatu untuk melawan.²⁸ Tulisan Ha berkontribusi sebagai salah satu sumber untuk menjelaskan dampak gerakan #MeToo di dunia pekerjaan Korea Selatan.

²⁷ Kim Chungah, Andrew Nielsen, Celine Teo, dan Antony Chum, “Social Movement and Mental Health of South Korean Women Sexual Violence Survivors, 2012–2019,” *American Journal of Public Health* Volume 112, no. 9, (2022): 1337 - 1345, <https://www.proquest.com/docview/2709982601/D64AFBAB39CD4A17PQ/52?accountid=31495>

²⁸ Ha Yeon Choo, “From Madwomen to Whistleblowers: MeToo in South Korea as an Institutional Critique,” *Feminist Formations* Vol. 33, no. 3, (2021): 256-270, <https://www.proquest.com/docview/2615627144/A155ED4169984E51PQ/1?accountid=31495>

Artikel jurnal kelima berjudul “#MeToo in East Asia: The Politics of Speaking Out” oleh Chang Ling Huang. Artikel jurnal ini berbicara tentang pergerakan #MeToo di Asia Timur. Berdasarkan penemuan Huang, gerakan #MeToo di Korea Selatan dapat tersebarluaskan secara masif dan berkembang dengan cepat karena adanya peran *mainstream* media dan sosial media. Keberadaan media sangat penting di Korea Selatan, karena pada umumnya media disana selalu berusaha untuk mengedukasi publik tentang topik-topik pelecehan dan kekerasan seksual melalui wawancara dengan ahli isu gender dan melalui analisis cerita-cerita personal dari penyintas. Media yang dimaksud adalah JTBC. Menurut Huang, tanpa keberadaan media jurnalisme berkualitas seperti JTBC, #MeToo tidak akan berkembang semasif sekarang. Hal ini dikarenakan media telah berperan dalam meningkatkan keberanian penyintas untuk bersuara. Selain peran media, gerakan sosial #MeToo juga berhasil menghukum pihak-pihak berkuasa di Korea Selatan (misalnya: gubernur dan walikota) sebagai pelaku kekerasan seksual. Fenomena ini juga semakin mendorong keberanian penyintas untuk bersuara dan #MeToo pun secara otomatis ikut berkembang dengan masif di Korea Selatan.²⁹ Tulisan ini berkontribusi dalam memberikan informasi terkait pentingnya peran media jurnalisme dalam gerakan #MeToo di Korea Selatan.

²⁹ Chang Ling Huang, “#MeToo in East Asia: The Politics of Speaking Out,” *Journal of Politics and Gender* Vol. 17, no. 3, (2021): 483-490, <https://www.proquest.com/docview/2578716585/fulltextPDF/A155ED4169984E51PQ/5?accountid=31495>.

Jika dikelompokan, terdapat kemiripan antara argumen Bernardini dan Schneider serta Carpenter. Bernardini menyatakan bahwa #MeToo dapat berkembang karena adanya upaya kolektif dari suatu kelompok untuk mempolitisasi gerakan ini untuk melawan rival politik mereka. Sedangkan Schneider dan Carpenter menyatakan bahwa #MeToo dapat berkembang karena banyak penyintas kekerasan seksual yang membutuhkan *coping mechanism* sehingga mereka memanfaatkan gerakan #MeToo. Meskipun isunya tampak berbeda, kemiripan dapat dilihat dari bagaimana kedua artikel jurnal menganggap bahwa #MeToo dapat berkembang karena adanya aksi kolektif dari suatu kelompok sosial di Masyarakat untuk memanfaatkan #MeToo untuk tujuan mereka masing-masing. Dalam tulisan Bernardini, kelompok yang dimaksud adalah kelompok pendukung partai demokrat dan dalam tulisan Schneider dan Carpenter, kelompok yang dimaksud adalah kumpulan penyintas kekerasan seksual.

Kemudian pengelompokan kedua, adalah tulisan milik Choo dan Huang. Choo menyatakan bahwa #MeToo di Korea Selatan dapat berkembang karena adanya upaya untuk melawan pihak-pihak yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dari pihak yang merasa tertindas. Kemudian dalam tulisan Huang, dinyatakan bahwa #MeToo dapat berkembang karena adanya keberhasilan penyintas setelah bersuara untuk mendapat keadilan dengan berhasil membawa pihak-pihak yang berkuasa ke pihak pengadilan. Jika diulas kembali, kemiripan argumen Choo dan Huang dapat dilihat dari gerakan #MeToo di Korea Selatan yang

diasosiasikan dengan penghukuman pihak berpengaruh selaras dengan pengalaman kolektif sekelompok masyarakat yang sering ditindas oleh pihak berkuasa.

Pengelompokan terakhir adalah tulisan milik Kim Chungah, Andrew Nielsen, Celine Teo, dan Antony Chum, karena tulisan ini berfokus pada pembahasan pengaruh gerakan #MeToo terhadap kesehatan mental penyintas kekerasan seksual di Korea Selatan. Literatur-literatur lainnya yang dikaji dalam tulisan ini lebih membahas proses berkembangnya #MeToo sedangkan tulisan milik Chungah dan lain-lain tidak membahas proses namun membahas dampak, sehingga belum bisa dikelompokan dengan tulisan-tulisan lainnya.

Berdasarkan literatur-literatur sebelumnya belum ada penelitian yang berfokus pada pemanfaatan *politicized collective identity* sebagai salah satu komponen gerakan sosial dalam perkembangan #MeToo. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba mengisi kekosongan tersebut. Tulisan ini akan diarahkan pada posisi baru yaitu akan menekankan pemanfaatan *politicized collective identity* dalam masyarakat Korea Selatan sebagai pendorong utama dalam perkembangan gerakan #MeToo di Korea Selatan pada tahun 2018-2020.

1.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan beberapa teori dan konsep pokok, diantaranya teori gerakan sosial, psikologi politik dalam gerakan sosial, dan *politicized collective identity*. Sebelum memasuki teori gerakan sosial, terdapat salah satu

aspek penting dan mendasar dalam psikologi politik gerakan sosial yaitu *The Political Being*. *Political being* mencakup beberapa komponen internal dalam diri manusia dan komponen eksternal. Komponen internal pertama adalah *personality*, kepribadian manusia adalah komponen inti yang menggerakkan pemikiran dan perasaan manusia. Komponen kedua adalah *value* dan *identity* dimana kepercayaan dan tujuan seorang manusia dapat memengaruhi preferensi politiknya. Komponen ketiga adalah *attitude*, aspek ini dapat memengaruhi keputusan dalam memilih, sosialisasi politik, cara kita berpikir dan merespon, serta toleransi politik. Komponen keempat adalah *emotions*, dimana aspek ini dipengaruhi dan memengaruhi semua aspek lainnya. Komponen kelima adalah *cognitive processes*, ini merupakan aspek dimana manusia menerima dan menginterpretasikan informasi yang didapat. Komponen eksternal pertama adalah *in-groups political being*, aspek ini dapat membuat manusia saling mendukung satu sama lain dan bersedia untuk berkorban. Komponen eksternal terakhir adalah *outgroups political being*, aspek ini dapat menimbulkan stereotip, diskriminasi, dan etnosentrisme.³⁰

Menurut Klandermans, gerakan sosial adalah tantangan kolektif oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama dan solidaritas yang diarahkan pada golongan elit dan pihak berwenang dalam interaksi berkelanjutan.³¹ Sebelum suatu gerakan sosial bisa teraktualisasi, terdapat beberapa kondisi yang dapat memicu aksi kolektif tersebut. Kondisi yang pertama adalah *dynamics of demands*. Kondisi tersebut meliputi adanya perilaku tidak adil, perbedaan/perbandingan sosial,

³⁰ Martha L. Cottam, *Ibid*, 9-13.

³¹ Martha L. Cottam, *Ibid*, 328.

banyak perasaan emosional, dan berkembangnya perasaan akan pentingnya identitas kolektif yang kemudian dipolitisasi.³² Kondisi yang kedua adalah adanya *dynamics of supply* atau mobilisasi yang mendorong banyak individu untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial tersebut. Mobilisasi dapat mempermudah partisipan untuk menyuarakan pesan mereka bersama-sama.³³

Klandermans dan Van Stekelenburg menyatakan bahwa gerakan sosial memiliki 3 karakteristik. Pertama, adanya upaya kolektif untuk menantang struktur, elit, dan budaya/norma yang ada. Kedua, aktor-aktor yang terlibat memiliki tujuan yang sama, solidaritas, dan membawa pesan serta identitas yang sama. Ketiga dan terakhir, aktor-aktor berinteraksi dalam aksi kolektif yang berkelanjutan.³⁴

Selain ketiga karakteristik menurut Klandermans dan Van Stekelenburg, gerakan sosial juga memiliki karakteristik-karakteristik lainnya. Karakteristik yang pertama adalah terdapatnya organisasi atau institusi pada beberapa gerakan sosial. Institusi tersebut berfungsi untuk mengatur atau mengembangkan gerakan sosial yang ada. Kemudian, *size* juga merupakan salah satu karakteristik yang dapat mendeterminasikan apakah gerakan sosial tersebut memiliki peluang besar dan efektif dalam mencapai tujuan mereka. Semakin besar suatu gerakan sosial, semakin penting dan relevan gerakan tersebut dalam masyarakat. Karakteristik selanjutnya adalah adanya *collective action* yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan seluruh kelompok. Karakteristik terakhir adalah struktur dalam gerakan sosial yang bervariasi. Ada gerakan sosial yang sangat hirarkis ada

³² Martha L. Cottam, Ibid.

³³ Martha L. Cottam, Ibid, 334.

³⁴ Martha L. Cottam, Ibid.

yang hanya bersifat perkumpulan bebas tanpa aturan terikat. Struktur tersebut dapat memengaruhi cara gerakan sosial tersebut merekrut partisipan dan menjalankan aksi mereka.³⁵

Dari aspek psikologi politik, terdapat beberapa alasan mengapa orang-orang bersedia untuk berpartisipasi atau bahkan mengorganisir suatu gerakan sosial. Teori ini menjadi penting dalam proses analisis pemanfaatan *politicized collective identity* dalam perkembangan #MeToo di Korea Selatan. Berikut beberapa teori untuk menjelaskan alasan-alasan tersebut:

- *Komponen emosional / emotional component*: munculnya perasaan sedih, marah, dan kecewa merupakan komponen yang sangat kuat sebagai alasan suatu kelompok/individu untuk berpartisipasi/mengorganisir suatu gerakan sosial. Komponen emosional ini lebih kuat dibanding komponen kognitif.³⁶
- *Politicized collective identity*:

Identitas kolektif merupakan identitas yang dimiliki bersama dengan orang lain secara berkelompok, dan ini terdiri dari identitas gender, umur, etnis, perilaku, sifat, dst.³⁷ Identitas kolektif membuat individu menjadi yakin bahwa dirinya merupakan bagian dalam suatu posisi di masyarakat dan menumbuhkan keyakinan bahwa suatu individu tidak pernah sendiri dan dapat mengandalkan

³⁵ Martha L. Cottam, *Ibid*, 329.

³⁶ Martha L. Cottam, *Ibid*.

³⁷ Simon Brend dan Bert Klandermans, "Politicized Collective Identity: A Social Psychological Analysis," *American Psychologist* Vol. 56, no. 4, (2001): 319-331, <https://doi.org/10.1037/0003-066X.56.4.319>.

dukungan dari kelompok sosial atau kelompok *in-group*nya. Semakin kuat keyakinan ini maka keinginan mereka untuk berjuang bersama untuk membawa perubahan juga semakin besar. Identitas kolektif juga merupakan aspek yang penting bagi fungsi-fungsi psikologis seseorang. 5 fungsi tersebut adalah *belongingness*, *distinctiveness*, *respect*, *understanding*, dan *agency*.³⁸ Sedangkan *politicized collective identity* adalah Identitas kolektif suatu kelompok yang dipolitisasi untuk mendorong keinginan kelompok tersebut untuk memulai atau berpartisipasi dalam suatu aksi yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.³⁹

Politicized collective identity merupakan suatu proses yang terdiri dari 3 tahap. Pertama, *awareness of shared grievances*. Sebelum identitas kolektif dapat dipolitisasi, harus ada kesadaran baru akan *shared grievances* atas ketidakadilan suatu kelompok. Perasaan *shared grievances* ini muncul karena kelompok yang bersangkutan melakukan perbandingan sosial dan menemukan fakta bahwa keadaan hidup kelompok mereka lebih buruk dari kelompok lainnya. Selain ketidakadilan, *shared grievances* juga bisa muncul apabila salah satu kelompok merasa hak istimewanya diancam. Identitas kolektif berperan besar dalam *shared grievances* ini karena

³⁸ Martha L. Cottam, *Ibid*, 321.

³⁹ Martha L. Cottam, *Ibid*, 333.

mentransformasikan apa yang awalnya “*your*” dan “*my*” *experience* menjadi “*our*” *experience*.⁴⁰

Setelah kesadaran ini muncul, akan memasuki tahap kedua yaitu *adversarial attribution to blame opponents*. Maksudnya, dalam tahap ini, kelompok yang bersangkutan akan menyalahkan pihak eksternal atas penderitaan yang mereka alami dan menuntut kompensasi terhadap pihak eksternal tersebut. Pihak eksternal yang dimaksud meliputi *out-group*, pihak otoritas, ataupun sistem yang ada di masyarakat. Tahap ini juga sekali lagi diperkuat dengan adanya identitas kolektif. Hal ini dikarenakan identitas kolektif memperkuat *stereotype in-group* dan *out-group* atau “*us-them*” *distinctions* sehingga *in-group* akan semakin menyalahkan *out-group* atas penderitaannya.⁴¹

Setelah tahap ini, akan memasuki tahap ketiga yaitu *the involvement of society*. Dalam tahap terakhir ini, kelompok yang menuntut perubahan akan meminta dukungan dari pihak ketiga yang memiliki otoritas atau kekuatan lebih seperti pemerintah dan masyarakat umum. Jika kelompok tersebut berhasil melibatkan pihak ketiga maka ketidakadilan/penderitaan yang dialami mereka berubah menjadi urusan publik/kepentingan umum. Sehingga *membership* dari kelompok yang menuntut tersebut menjadi lebih

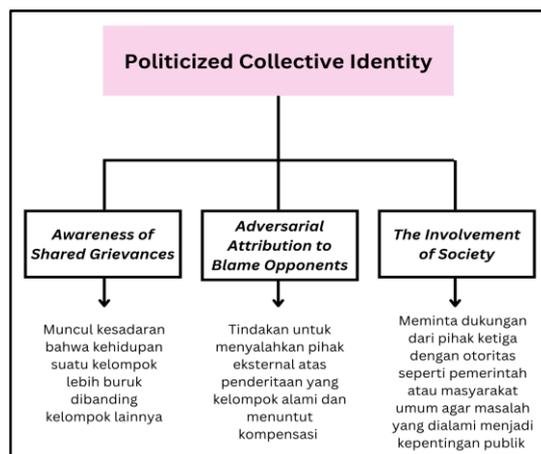
⁴⁰ Simon Brend dan Bert Klandermans, Ibid.

⁴¹ Simon Brend dan Bert Klandermans, Ibid.

inklusif karena sudah melibatkan banyak pihak.⁴² Tahap ini bisa terjadi apabila pihak eksternal menolak untuk memberi kompensasi yang dituntut pada tahap sebelumnya. Sehingga kelompok tersebut pun harus melanjutkan politisasi identitas kolektif mereka agar dapat meminta dukungan dari masyarakat umum/pihak otoritas untuk mendukung dalam menuntut *out-group*.⁴³

Berikut adalah bagan yang dapat menjelaskan 3 proses *politicized collective identity* secara singkat:

Gambar 1.1 Bagan Teori *Politicized Collective Identity*



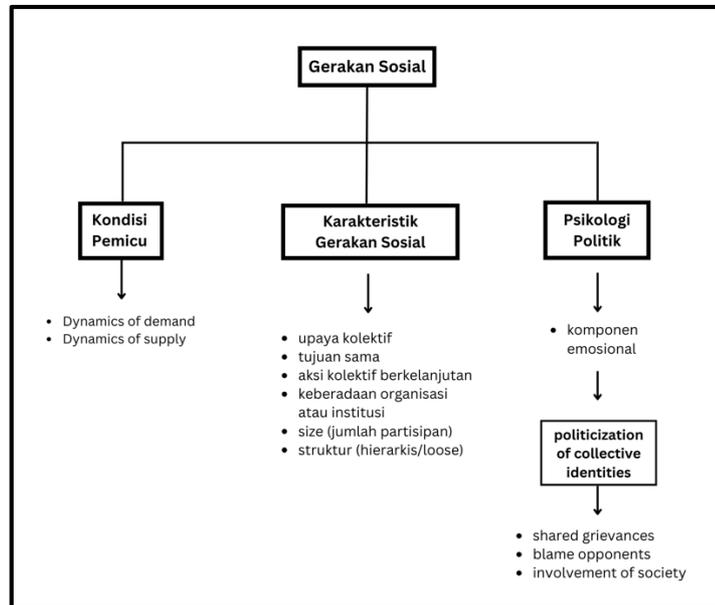
Sumber: olahan penulis

Kemudian, untuk *leaders* dalam gerakan sosial. Posisi pemimpin dalam gerakan sosial tidak terlalu kuat karena biasanya gerakan sosial bersifat sukarela sehingga minim otoritas. Sehingga biasanya pemimpin berperan untuk menyuarakan ketidakadilan yang kelompoknya alami dalam cara tertentu yang dapat menginspirasi calon-calon partisipan agar mereka percaya bahwa ketidakadilan tersebut dapat diselesaikan melalui aksi kolektif.

⁴² Simon Brend dan Bert Klandermans, Ibid.

⁴³ Ibid.

Gambar 1.2 Bagan Model Kerangka Pemikiran Terkait Gerakan Sosial dalam Psikologi Politik



Sumber: olahan penulis

Selain teori-teori di atas terdapat beberapa istilah-istilah yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan kekerasan seksual. Pertama, standar ganda dalam gender yang memiliki arti adanya perbedaan evaluasi terhadap perempuan dan laki-laki atas perilaku yang sama, apa yang dianggap lumrah bagi salah satu gender dianggap tidak lumrah bagi gender lainnya dan sebaliknya.⁴⁴ Kedua, stereotip gender yang berarti sebuah pandangan terkait karakteristik yang harus dimiliki atau peran yang harus dilakukan oleh perempuan atau laki-laki.⁴⁵ Stereotip ini dapat bersifat positif maupun negatif.⁴⁶ Ketiga adalah objektifikasi yang terjadi ketika

⁴⁴ William G. Axinn, Linda Young-DeMarco, dan Meeso Caponi Ro, "Gender Double Standards in Parenting Attitudes," *Soc Sci Res* Vol. 40, no. 2, (2011): 417-432, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3035381/#:~:text=Defining%20the%20Gender%20Double%20Standard&text=Thus%20a%20gender%20double%20standard,equally%20so%20for%20the%20other.>

⁴⁵ "Gender Stereotypes and Stereotyping and Women's Rights," OHCHR, Diakses pada 9 Agustus 2023, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WRGS/OnePagers/Gender_stereotyping.pdf

⁴⁶ OHCHR, Ibid.

bagian tubuh seseorang dianggap sebagai objek yang bisa dinikmati melalui pandangan dan sentuhan.⁴⁷ Keempat adalah *secondary victimization* yang berarti penderitaan/kerugian baru yang dialami penyintas setelah menjadi korban pada kejahatan sebelumnya (misalnya: kejahatan pertama yang diterima penyintas adalah kekerasan seksual, namun setelah itu penyintas menerima perilaku *victim blaming* dari masyarakat. *Victim blaming* ini menjadi salah satu bentuk *secondary victimization*.⁴⁸ Keempat istilah tersebut akan digunakan dalam tulisan ini

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu metode yang berfokus untuk mengeksplorasi makna dari suatu peristiwa sosial dan kemanusiaan serta mencakup pendekatan interpretatif terhadap data yang diperoleh.⁴⁹ Secara detilnya, penelitian menggunakan jenis penelitian studi kasus dalam metode kualitatif. Menurut Tony Dwi Susanto metode studi kasus adalah sebuah penelitian dimana peneliti tidak melakukan intervensi dalam fenomena yang ingin diteliti, peneliti hanya berperan untuk mendatangi, menganalisis, dan mengobservasi fenomena.⁵⁰

⁴⁷ Ika Kartika Febriana, "Objektifikasi Perempuan dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental," Tempo, Diakses pada 23 Agustus 2023, <https://kolom.tempo.co/read/1136290/objektifikasi-perempuan-dan-pengaruhnya-terhadap-kesehatan-mental>.

⁴⁸ Fany Hakim, "Kekerasan Seksual, Viktimisasi, dan Kesehatan Mental," Detik News, 6 Desember 2021, <https://news.detik.com/kolom/d-5842703/kekerasan-seksual-viktimisasi-dan-kesehatan-mental#:~:text=Dalam%20istilah%20kriminologi%2C%20dikenal%20istilah,menjadi%20korban%20dari%20kejahatan%20primer>.

⁴⁹ Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 16-17.

⁵⁰ Maura Rosita Hafizha, "Studi Kasus adalah: Jenis, Tujuan, dan Contohnya," Detik Bali, 9 Februari 2023, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6560110/studi-kasus-adalah--jenis-tujuan-dan-contohnya>.

Metode ini dipilih karena peneliti mengobservasi dan menganalisis sebuah fenomena yang terjadi di Korea Selatan tanpa melakukan intervensi. Selain itu peneliti juga hanya tertarik untuk menjelaskan hubungan antara *politicized collective identity* dengan gerakan sosial #MeToo secara spesifik, sehingga studi kasus eksplanatori menjadi metode yang dapat mengakomodasi penelitian ini.

Penelitian mencoba untuk membedah identitas kolektif yang dominan dalam gerakan sosial #MeToo. Lalu berdasarkan hasil pembedahan tersebut, penelitian mencoba mengungkap makna dari identitas kolektif tersebut dan bagaimana identitas tersebut dapat berimplikasi terhadap gerakan #MeToo di Korea Selatan. Penelitian menggunakan salah satu komponen gerakan sosial yaitu *politicization of collective identity* sebagai salah satu teori untuk membantu proses. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang paling dapat mengakomodir tujuan penelitian ini.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian memanfaatkan teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai dokumen dan sumber internet yang terpercaya. Misalnya, laporan dari Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga Korea Selatan, jurnal akademik (Misalnya, dari *American Psychological Association* dan *Cambridge*), artikel media massa (BBC, CNN, dst), dan buku-buku yang membahas gerakan #MeToo (sebagai contoh: *The Routledge Handbook of*

the Politics of the #MeToo Movement, #MeToo and the Politics of Social Change, dan The #MeToo Movement). Penelitian ini menggunakan studi dokumentasi dalam teknik pengumpulan datanya.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi ke dalam 4 (empat) bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab 1 dalam penelitian ini membahas latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang dilengkapi dengan deskripsi masalah, pembatasan masalah, dan pertanyaan penelitian. Kemudian, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian dan kajian literatur seputar gerakan sosial #MeToo. Setelah itu memasuki kerangka pemikiran yang berisi konsep-konsep dan teori-teori dalam gerakan sosial, terutama teori *politicized collective identity*. Terakhir, memasuki bagian metode penelitian dan teknik pengumpulan data.

Bab 2 membahas tentang budaya konfusianisme, patriarki, dan kesetaraan gender di Korea Selatan. Informasi terkait nilai-nilai konfusianisme yang dianut masyarakat Korea Selatan dianggap telah mempertahankan budaya patriarki. Kepercayaan terhadap nilai tersebut dianggap menjadi salah satu dasar akan mengapa perempuan kerap kali menjadi korban diskriminasi gender hingga kekerasan seksual. Informasi ini menjadi penting untuk memahami lebih lanjut keadaan kesetaraan gender di negara tersebut. Lalu, membahas awal mula gerakan #MeToo di Amerika Serikat hingga sampai ke Korea Selatan. Kemudian, penelitian juga menyediakan informasi terkait contoh kasus kekerasan seksual #MeToo yang terjadi di Korea Selatan serta kelompok yang rawan menjadi penyintas kekerasan

seksual di negara tersebut. Terakhir, bab ini juga membahas identitas kolektif dalam kelompok pendukung gerakan sosial #MeToo di Korea Selatan.

Bab 3 berisi analisis #MeToo sebagai gerakan sosial menggunakan konsep, teori-teori, dan karakteristik gerakan sosial. Selanjutnya, bab 3 juga menganalisis psikologi politik gerakan sosial dalam kasus #MeToo di Korea Selatan menggunakan komponen emosional, dan hubungan antara pemanfaatan identitas kolektif dalam gerakan #MeToo di Korea Selatan dengan teori *politicized collective identity*. Kemudian, penelitian juga mencoba untuk membedah mobilisasi dan sosok *leader* dalam gerakan sosial #MeToo di Korea Selatan.

Bab 4 berisi kesimpulan dan keterbatasan penelitian, serta rekomendasi dari penulis terhadap isu ini.